

BAB 5 KESIMPULAN

Transformasi politik pada hakikatnya adalah sebuah proses yang kompleks yang membutuhkan kontribusi timbal balik dari pihak yang ditransformasikan dan dari pihak yang hendak dituju oleh proses tersebut. Mantan anggota GAM sebagai subjek yang ditransformasikan perlu didorong untuk mampu mengambil kesempatan di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan sebagainya, sedangkan masyarakat luas didorong untuk membangun sikap-sikap akomodatif, sehingga sepenuhnya dapat menerima mantan anggota GAM dan para tahanan politik lainnya kembali menjadi bagian dari mereka.

Perjanjian Helsinki itu memberi ruang bagi GAM masuk ke arena politik elektoral melalui partai politik lokal di Aceh. Gerakan yang mulai sejak 1976 itu kini menghadapi satu fase transisi menentukan. Proses perubahan selalu menyodorkan fakta tentang apa yang tetap dan yang berubah. Bagi GAM yang tetap adalah dukungan hegemonik di basis tradisional dan yang berubah adalah format organisasi, program dan strategi.

Kemudian dari hasil analisa dan temuan-temuan dilapangan bahwa proses transformasi GAM menjadi partai Aceh ini hanya merubah namanya saja tetapi secara struktur masih tetap seperti dulu. Jadi GAM hanya merubah namanya saja menjadi Partai Aceh komposisi didalamnya masih tetap seperti Gerakan Aceh Merdeka dulu. Karena basis kombatan GAM masih memegang peranan penting dalam proses penggerak Partai Aceh dilapangan dan sistem kerja masih menggunakan struktur yang ada didalam GAM dulu.

Fakta menunjukkan struktur mobilisasi GAM efektif memenangkan calon mereka dalam pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tiga tahun silam. Pada pemilu legislatif 2009 kemarin GAM yang telah bertransformasi menjadi Partai Aceh, berhasil memenangkan 47% atau sekitar satu juta suara pemilih di Aceh. Mereka menguasai 33 dari 69 kursi di DPRD Aceh. Sisa 36 kursi harus dibagi kepada 11 partai nasional dan lokal lainnya. Sebagai kekuatan mayoritas komposisi

itu merefleksikan Partai Aceh adalah kekuatan politik lokal baru di Aceh pasca perdamaian.

Proses tranformasi politik ini memang memakan waktu yg panjang ini merupakan sebuah proses dimana merubah nilai-nilai pada diri mereka yg sudah tertanam menjadi sebuah nilai-nilai baru yang harus benar-benar di junjung dan di tanamkan dalam diri mereka. Sehingga proses tranformasi politik ini dapat berjalan dengan baik walaupun ini memakan waktu yang cukup lama juga. Demikian juga yang terjadi di Aceh tranformasi politik dari Gerakan Aceh Merdeka menjadi partai Aceh masih berlangsung sampai saat ini, karena proses tranformasi GAM menjadi Partai Aceh ini merupakan sebuah pemindahan idiologi perjuangan dari pemberontakan menjadi perjuangan di jalur politik. Jadi mau tidak mau proses ini pasti memakan waktu karena masih tertanamnya nilai-nilai lama pada diri mereka jadi masih membutuhkan waktu dalam bertransformasi menjadi partai Aceh.

Dari pembahasan di bab tiga dan empat diatas sudah terlihat adanya proses tranformasi politik dari GAM menjadi Partai Aceh, sehingga telah terjadi sebuah perubahan yang fundamental dalam tubuh GAM. Proses tranformasi ini memang membutuhkan waktu untuk sampai pada tahap sempurna, dan hal ini juga harus di lakukan secara menyeluruh dengan melibatkan semua komponen dalam tubuh GAM sendiri maupun masyarakat Aceh sehingga proses tranformasi ini akan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bukan hanya kepada GAM saja tetapi seluruh komponen masyarakat Aceh .

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh Partai Aceh diantaranya dengan Sekjen Partai Aceh dan Ketua DPD Partai Aceh Kota Banda Aceh terdapat perbedaan pendapat masalah transformasi politik anggota GAM menjadi Anggota Partai Aceh. Sekjen Partai Aceh mengatakan semua mantan kombatan GAM maupun anggota GAM harus bertransformasi menjadi Partai Aceh, dan beliau mengatakan semua mantan kombatan itu wajib hukumnya menjadi anggota partai Aceh. Karena menurut beliau ini merupakan amanat dari MoU Helsinki dan perubahan ide perjuangan menjadi perjuangan politik bukan bersenjata lagi seperti dulu.

Sedangkan Ketua DPD Partai Aceh kota Banda Aceh yang juga merupakan mantan Juru bicara GAM wilayah Aceh Besar mengatakan tidak semua anggota GAM bertransformasi menjadi Partai Aceh di mengatakan hanya sekitar 20% saja yang terlibat dalam Partai Aceh selebihnya memilih profesi lain, namun dia mengatakan semua mantan kombatan mendukung Partai Aceh sepenuhnya. Jadi menurut dia tidak semua mantan kombatan terlibat langsung dalam Partai Aceh karena ternyata para calon legislatif yang terpilih pada pemilu kemarin hanya sekitar 20% yang murni mantan kombatan. Jadi dia mengatakan banyak mantan kombatan tidak bertransformasi di jalur politik melainkan banyak yang menjadi kontraktor atau berwirausaha. Hal ini tidak mempengaruhi niat mereka untuk tetap memperjuangkan kemakmuran masyarakat Aceh. Mereka yang di luar jalur Partai Aceh sewaktu-waktu kalau di dibutuhkan akan tetap membantu Partai Aceh sekuat tenaga, dia mencontohkan ketika Wali Nanggroe atau Hasan Tiro pulang ke Aceh mereka semua kompak menyambut kepulangan beliau baik para anggota Partai Aceh maupun yang tidak terlibat dalam Partai Aceh ikut bahu membahu menyambut kepulangan Hasan Tiro ke Aceh. Jadi menurut dia tidak ada masalah yang harus terlalu di risaukan.

Dari pendapat kedua tokoh tersebut terlihat adanya perbedaan pendapat masalah transformasi tersebut. Tapi dari kedua penjelasan tersebut mereka pada dasarnya ikut terlibat juga dalam Partai Aceh tetapi tidak langsung fokus seratus persen. Namun dari pengamatan saya juga melihat para mantan kombatan masih ada yang terlibat didalam Partai Aceh walaupun banyak dari mereka tidak terlibat langsung dalam Partai Aceh tersebut. Namun mereka akan dengan sukarela turutan membantu Partai Aceh misalnya pada saat kampanye Pemilu kemarin, pada saat kepulangan Hasan Tiro ke Aceh, dan rapat internal mereka juga di hadiri oleh para mantan kombatan GAM tersebut walaupun mereka diluar kepengurusan. Peneliti melihat langsung bagaimana rapat internal Partai Aceh tidak hanya di hadiri oleh pengurus Partai Aceh tetapi juga oleh mantan kombatan yang ada di luar struktur Partai Aceh.

Proses perdamaian di Aceh masih membutuhkan kemauan politik pemerintah dan pihak internasional serta kepercayaan dari GAM dan masyarakat Aceh. Gagalnya beberapa proses perdamaian sebelum MoU Helsinki lebih

disebabkan oleh rasa tidak percaya antara pihak GAM dan Pemerintah RI, selain itu dinamika politik nasional juga sangat mempengaruhi penetapan kebijakan pemerintah di Aceh. Pendekatan berupa operasi militer terbukti tidak efektif untuk mengakhiri gerakan separatis seperti DI/TII dan GAM, diplomasi terbuka lebih memberikan keuntungan bagi proses perdamaian.

Pemerintahan Indonesia yang demokratis dan menjamin keadilan di sektor ekonomi dan sosial merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas politik, sistem yang demokratis akan menjamin semua pihak pada setiap level dalam struktur masyarakat bisa berkontribusi mulai dari pengambilan kebijakan, implementasi, evaluasi hingga pemantauan proses pembangunan dan politik.

Keberlanjutan perdamaian di Aceh sangat bergantung pada keberhasilan program transformasi politik yang hingga penulisan skripsi ini masih berlangsung (direncanakan sampai tahun 2009). Berbagai hambatan yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan kinerja BRDA harus segera diselesaikan oleh pemerintah RI, masyarakat Aceh, Pihak Internasional serta donor. Agenda-agenda lanjutan (setelah program DDR) yang meliputi agenda keamanan, demokrasi dan pembangunan harus direncanakan dengan baik dan implementasinya tepat sasaran.